

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Tinjauan Umum Pengertian Persepsi Masyarakat

Manusia adalah makhluk monodualistik yaitu sebagai makhluk individu yang berarti mempunyai kehendak, cita-cita dan kepribadian sendiri yang berbeda antara manusia dengan manusia lainnya. Manusia adalah makhluk yang sempurna yang diberi akal, maka dengan akal manusia dapat menjalani kehidupan yang diperolehnya melalui pengetahuan dan proses berpikir yang diperolehnya melalui jalur formal maupun non formal. Dan manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dan membutuhkan manusia yang lain dalam kehidupannya.

Dalam penelitian ini, penelitian memberikan gambaran mengenai pengertian persepsi agar dapat memperjelas permasalahan yang akan dibahas. Berikut ini beberapa pengertian persepsi menurut para ahli.

Menurut Walgito (1993:53) menyatakan bahwa : "persepsi adalah merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yang merupakan proses yang berwujud diterimanya stimulus melalui alat reseptornya".

Sedangkan Sarwono (1993:53), mengatakan bahwa "persepsi adalah kemampuan untuk membedakan antara benda satu dengan yang lainnya, mengelompokkan benda-benda yang berdekatan atau serupa serta dapat memfokuskan perhatiannya pada suatu objek".

Berdasarkan pendapat di atas, persepsi dapat disimpulkan sebagai suatu pandangan atau tanggapan seseorang terhadap suatu objek, yang dipengaruhi oleh pengindraannya, lingkungan, pengalaman, kebiasaan dan kebutuhan sehingga dapat memberikan makna sebagai hasil dari pengamatan dari objek tertentu.

Didukung pula oleh Morgan, King dan Robinson dalam Adi (1994:105) "persepsi menunjuk pada bagaimana kita melihat, mendengar, merasakan, mengecap dan mencium dunia sekitar, dengan kata lain persepsi dapat pula didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dialami manusia".

Sejalan dengan Atkinson (1997:12) bahwa persepsi adalah "proses dimana kita mengorganisasi dan menafsirkan pola stimulus ini dalam lingkungan".

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah proses menafsirkan sesuatu dengan menggunakan alat penerima informasi misalnya melihat, mendengar, merasakan, mengecap, dan mencium.

Jadi berdasarkan teori-teori di atas kaitannya peneliti dapat memberikan kesimpulan tentang pengertian persepsi adalah pandangan atau pemahaman suatu masyarakat tertentu terhadap apa yang sedang terjadi tentang keadaan tertentu yang terjadi pada saat itu”.

2. Syarat-syarat Mengadakan Persepsi

Seseorang agar dapat mengadakan persepsi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Adanya objek yang dipersepsikan: objek yang menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar langsung mengenai alat indera (reseptor) dapat datang dari dalam yang langsung mengenai syaraf penerima (sensoris) yang bekerja sebagai reseptor.
- b. Alat indera atau reseptor yaitu merupakan alat guna untuk menerima stimulus disamping itu harus ada pula syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf yaitu otak sebagai pusat kesadaran dan sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan syaraf motoris.
- c. Untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi sesuatu diperlukan pula adanya perhatian, yang merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam mengadakan persepsi. Tanpa perhatian tidak akan terjadi persepsi. Dari hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mengadakan persepsi ada syarat yang bersifat fisik atau kealaman, fisiologis, dan psikologis.
(Walgito, 1993 : 54)

Menurut pendapat di atas untuk mengadakan suatu persepsi maka dibutuhkan adanya objek yang sedang terjadi, adanya penginderaan dan diperlukan suatu perhatian.

Selain itu, Walgito menyatakan proses persepsi berlangsung sebagai berikut:

- a. Stimulus mengenai alat indera, ini merupakan proses yang bersifat kewanalman (fisik).
- b. Stimulus kemudian dilangsungkan ke otak oleh syaraf sensoris, proses ini merupakan merupakan proses fisiologis.
- c. Di otak sebagai susunan urat syaraf terjadilah proses yang akhirnya individu dapat menyadari tau mempersepsi tentang apa yang diterima melalui alat indera. Proses yang terkaji dalam otak ini merupakan proses psikologis.

(Walgito, 1993 : 76)

Dari beberapa pendapat para ahli di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi adalah adanya suatu objek tertentu kemudian disalurkan oleh alat indera ke otak dan kemudian otak mengolahnya menjadi suatu persepsi dari apa yang diterima oleh alat inderanya. Selain itu suatu objek dapat pula dipersepsikan secara berbeda-beda antara satu orang dengan yang lain, karena beberapa sebab diantaranya adalah karena seseorang memiliki pola berpikir yang berbeda.

3. Hal-hal yang Mempengaruhi Persepsi

Adanya perbedaan persepsi mengenai suatu objek antara satu orang dengan yang lain, disebabkan oleh beberapa aspek yaitu:

- a. Perhatian: biasanya seseorang tidak menangkap seluruh rangsangan yang ada di sekitarnya sekaligus tetapi akan memfokuskan perhatiannya pada satu atau dua objek saja. Perbedaan fokus menyebabkan perbedaan persepsi.
- b. Set: yaitu harapan seseorang akan rangsangan yang timbul misalnya seorang pelari yang siap start terdapat set bahwa akan terdengar bunyi pistol disaat harus lari.
- c. Kebutuhan: kebutuhan sesaat maupun yang menetap pada diri seseorang akan mempengaruhi persepsi orang lain.
- d. Sistem nilai: sistem yang berlaku dalam suatu masyarakat berpengaruh pula terhadap persepsi.

- e. Ciri kepribadian : misal A dan B bekerja di suatu kantor, A seorang yang penakut akan mempersepsikan atasannya sebagai tokoh yang menakutkan sedangkan B yang penuh percaya menganggap atasannya orang yang dapat diajak bergaul seperti orang biasa lainnya.
(Sarwono, 1983 : 43-44)

Demikian jelaslah bahwa perbedaan persepsi antara orang yang satu dengan orang yang lain, disebabkan oleh aspek perhatian, set atau harapan, kebutuhan, sistem nilai, dan ciri kepribadian.

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Secara garis besar telah diberikan penjelasan mengenai pengertian persepsi, syarat-syarat melakukan persepsi, dan hal-hal apa saja yang mempengaruhi persepsi, maka perlu kiranya diberikan sedikit penjelasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, maka akan timbul berbagai persepsi antara satu orang dengan orang yang lainnya terhadap objek yang sama.

David Krech dan Crutfield sebagaimana dikutip oleh Rakhmat (1994 : 55-59) menjelaskan ada dua faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang yaitu:

1. Faktor Fungsional

Faktor yang berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal lain yang termasuk dalam faktor personal yang menentukan persepsi bukan jenis atau stimulant tetapi karakteristik seseorang yang memberikan respon pada stimulant itu. Faktor-faktor fungsional ini terdiri atas:

- a. Kebutuhan-kebutuhan sesaat dan kebutuhan menetap pada diri seseorang akan mempengaruhi atau menentukan persepsi seseorang, dengan demikian kebutuhan yang berbeda akan menghasilkan persepsi.
- b. Kesiapan mental, suasana mental seseorang akan mempengaruhi perbedaan persepsi seseorang.

- c. Suasana emosi, suasana emosi seseorang baik dia dalam keadaan sedih, bahagia, gelisah maupun marah akan berpengaruh pada persepsi.
 - d. Latar belakang budaya, latar belakang budaya dimana orang tersebut berada atau berasal, berpengaruh terhadap objek rangsangan.
2. Faktor Struktural
- Faktor struktural semata-mata berasal dari sifat stimulan fisik dan dalam sistem syaraf individu yang meliputi:
- a. Kemampuan berpikir.
 - b. Daya tangkap duniawi.
 - c. Saluran daya tangkap yang ada pada manusia.
- (Rakhmat, 1994 : 55-59)

Persepsi seseorang itu dapat berubah-ubah, misalnya dari baik menjadi buruk dan juga sebaliknya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- 1. Faktor lingkungan
- 2. Faktor Konsepsi
- 3. Faktor yang berhubungan dengan konsep seseorang tentang diri sendiri. Faktor yang berhubungan dengan tujuan dan dorongan untuk menghasilkan rangsangan. (Ensiklopedi Umum, 1977 : 886)

Melihat faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, umumnya persepsi seseorang dipengaruhi oleh: cara belajar, latar belakang budaya pendidikan, pola pikir, pengalaman masa lalu dan latar belakang dimana orang tersebut berada sehingga akan menghasilkan persepsi yang bermacam-macam seperti setuju, kurang setuju, tidak setuju atau paham, kurang paham, tidak paham terhadap objek yang diteliti.

5. Pengertian Persepsi Masyarakat

Setiap daerah yang ada di dunia mempunyai sebuah penduduk yang mendiami daerah tertentu. Di Indonesia sendiri terdapat banyak keanekaragaman penduduk yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah memiliki ciri khas sendiri di daerahnya. Penduduk itu sendiri terdapat berbagai masyarakat yang majemuk.

Secara etimologis, pengertian masyarakat desa bisa disamakan dengan rural community yaitu "suatu kelompok manusia yang secara nyata ada maupun fiktif bertempat di wilayah (rural) desa, dimana anggota-anggotanya memiliki kepentingan-kepentingan tertentu, mempunyai suatu kesamaan bahwa hanya dengan hidup demikianlah maka kebutuhan-kebutuhan pokok untuk kelangsungan hidupnya dapat terpenuhi".

(Beratha, 1982 : 19)

Menurut Suparto memberi pengertian masyarakat desa sebagai berikut:

"masyarakat mempunyai keterikatan yang relatif kuat terhadap kehidupan tradisional, pada batas-batas tertentu ditandai dengan interaksi yang lebih besar antara sesama anggotanya dibandingkan penduduk diluar batas wilayahnya, serta memiliki ikatan solidaritas yang kuat antara sesamanya sebagai pengaruh kesatuan tempat tinggalnya. Pada masyarakat ini berlaku keteraturan-keteraturan kehidupan sosial yang mencakup kegiatan-kegiatan ekonomi, keamanan dan politik serta hukum yang coraknya sesuai dengan lingkungan hidupnya". (1987 : 197)

Menurut Comte dalam buku Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan (1994:31) mengatakan bahwa masyarakat merupakan kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut

hukum-hukumnya sendiri dan berkembang menurut pola perkembangan yang tersendiri.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat diberi pengertian masyarakat desa yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu sebagai satu kesatuan hukum, terorganisir, memiliki lembaga formal maupun non formal, dan berkaitan dengan hukum dan pemerintahan, mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya dalam rangka memenuhi kebutuhannya, serta memiliki ciri-ciri/karakteristik khusus dan has yang membedakannya dengan masyarakat lain.

Persepsi masyarakat diartikan sebagai pendapat masyarakat terhadap objek tertentu berdasarkan indikator pengetahuan dan pengamalannya.

6. Pengertian PNPM Mandiri

PNPM Mandiri merupakan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat di pekon. Program ini berupaya untuk menciptakan/meningkatkan kualitas masyarakat, baik secara individu maupun kelompok dalam memecahkan berbagai persoalan baik untuk meningkatkan kualitas kehidupan, kemandirian dan kesejahteraan.

PNPM Mandiri merupakan salah satu dari berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dirancang berdasarkan pembelajaran terbaik pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat selama ini.

Hal ini selaras dengan Peraturan Presiden tentang percepatan penanggulangan kemiskinan No. 15 Tahun 2010 Pasal 1 yaitu:

1. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
2. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
3. Tim Nasional Penanggulangan Kemiskinan merupakan tim lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan.
4. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Provinsi adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat provinsi.
5. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/kota adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten/kota.

Untuk dapat berpartisipasi dalam PNPM Mandiri , dituntut adanya kesiapan dari masyarakat dan pekon dalam menyelenggarakan pertemuan-pertemuan musyawarah secara swadaya dan menyediakan kader-kader pekon yang bertugas secara sukarela serta adanya kesanggupan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan dalam PNPM Mandiri . Untuk mengoptimalkan pengelolaan program, bagi kecamatan yang memiliki jumlah desa lebih dari 20 disarankan untuk menggabungkan pekon-pekon tersebut menjadi sekurang-kurangnya 10 satuan pekon (*cluster*). Penggabungan tersebut didasarkan atas kesepakatan pekon-pekon dengan mempertimbangkan kedekatan wilayah.

7. Pelaku PNPM Mandiri

Pelaku di pekon/desa adalah pelaku-pelaku yang berkedudukan dan berperan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri di pekon. Pelaku di pekon meliputi:

1) Kepala Pekon (Kakon)

Peran kepala pekon adalah sebagai pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan PNPM Mandiri di Pekon. Bersama Badan Himpun Pekon (BHP), kepala pekon menyusun peraturan pekon yang relevan dan mendukung terjadinya proses pelebagaan prinsip dan prosedur PNPM Mandiri sebagai pola pembangunan partisipatif, serta pengembangan dan pelestarian aset PNPM Mandiri yang telah ada di pekon. Kepala pekon juga berperan mewakili desanya dalam pembentukan forum musyawarah atau badan kerja sama.

2) Badan Himpun Pekon (BHP)

Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri , BHP berperan sebagai lembaga yang mengawasi proses dari setiap tahapan PNPM Mandiri , termasuk sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian di pekon. Selain itu juga berperan dalam melegalisasi atau mengesahkan peraturan pekon yang berkaitan dengan pelebagaan dan pelestarian PNPM.

3) Tim Pengelola Kegiatan (TPK)

TPK terdiri dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah pekon sosialisasi yang mempunyai fungsi dan peran untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di pekon dan mengelola administrasi, serta keuangan PNPM Mandiri . TPK sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Bendahara, dan Sekretaris. Pada saat Musyawarah Pekon Informasi hasil MAD keanggotaan TPK dilengkapi dengan Ketua Bidang yang menangani suatu jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.

4) Tim Penulis Usulan (TPU)

TPU berasal dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah pekon. Peran Tim Penulis Usulan adalah menyiapkan dan menyusun gagasan-gagasan kegiatan yang telah ditetapkan dalam musyawarah pekon dan musyawarah khusus perempuan, serta dokumen-dokumen yang diperlukan untuk musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) reguler. Anggota TPU dipilih oleh masyarakat berdasarkan keahlian dan ketrampilan yang sesuai dengan jenis kegiatan yang diajukan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, TPU bekerja sama dengan kader-kader pekon yang ada.

5) Tim Pemantau

Tim Pemantau menjalankan fungsi pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang ada di pekon. Keanggotaannya berasal dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah pekon. Jumlah anggota

tim pemantau sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan saat musyawarah. Hasil pemantauan kegiatan disampaikan saat musyawarah pekon dan antar pekon (jika diperlukan).

6) Tim Pemelihara

Tim Pemelihara berperan menjalankan fungsi pemeliharaan terhadap hasil-hasil kegiatan yang ada di pekon, termasuk perencanaan kegiatan dan pelaporan. Keanggotaannya berasal dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah pekon perencanaan. Jumlah anggota tim pemelihara sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan saat musyawarah. Hasil laporan pemeliharaan disampaikan saat musyawarah pekon dan antar pekon (jika diperlukan). Dalam menjalankan fungsinya, tim pemelihara didukung dengan dana yang telah dikumpulkan atau yang berasal dari swadaya masyarakat setempat.

7) Kader Pemberdayaan Masyarakat Pekon/Kelurahan (KPMP/K)

KPMP/K adalah warga pekon terpilih yang memfasilitasi atau memandu masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan tahapan PNPM Mandiri di Pekon dan kelompok masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pemeliharaan. Sebagai kader masyarakat yang peran dan tugasnya membantu pengelolaan pembangunan di pekon, diharapkan tidak terikat oleh waktu. Jumlah KPMP/K disesuaikan dengan kebutuhan pekon dengan mempertimbangkan keterlibatan atau peran serta kaum perempuan,

kemampuan teknik, serta kualifikasi pendampingan kelompok ekonomi dan sebagainya. Namun jumlahnya sekurang-kurangnya dua orang, satu laki-laki dan satu perempuan. Kualifikasi kemampuan teknik berguna untuk memfasilitasi dan membantu TPU membuat penulisan usulan dan membantu pelaksanaan kegiatan prasarana infrastruktur yang diusulkan masyarakat.

Kualifikasi keterlibatan kader dari perempuan adalah perwujudan kebijakan untuk lebih berpihak, memberi peran dan akses dalam kegiatan pembangunan untuk kaum perempuan, terutama meningkatkan mutu fasilitasi musyawarah khusus perempuan.

8) Kelompok Masyarakat (Pokmas)

Pokmas adalah kelompok masyarakat yang terlibat dan mendukung kegiatan PNPM Mandiri, baik kelompok sosial, kelompok ekonomi maupun kelompok perempuan. Termasuk sebagai kelompok masyarakat misalnya kelompok arisan, pengajian, kelompok ibu-ibu PKK, kelompok usaha ekonomi, kelompok pengelola air, kelompok pengelola pasar pekon, dsb.

8. Persepsi Masyarakat Terhadap PNPM Mandiri

Pelaksanaan PNPM Mandiri di Pekon Sopyono melalui banyak proses dan prosedur yang dilalui, dikatakan oleh ketua Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPMD) PNPM Mandiri yaitu Bapak Agusmanto (38 Tahun) melalui wawancara yang dilaksanakan pada hari Rabu Pukul 15.30 WIB Tanggal 18 Agustus 2011 di Kediannya yaitu di Jalan Samudera No.

15 Soponyono, menjelaskan beberapa tahapan dalam melaksanakan PNPM Mandiri yaitu sebagai berikut:

1. Desa Berpartisipasi

Seluruh Pekon di kecamatan penerima PNPM Mandiri berhak berpartisipasi dalam seluruh tahapan program. Namun, untuk kecamatan - kecamatan yang pemilihan maupun penentuan besarnya Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) didasarkan pada adanya pekon tertinggal, maka kegiatan yang diusulkan oleh pekon-pekon tertinggal akan mendapat prioritas didanai. Besarnya pendanaan kegiatan dari pekon tertinggal tergantung pada besar/volume kegiatan yang diusulkan. Untuk dapat berpartisipasi dalam PNPM Mandiri , dituntut adanya kesiapan dari masyarakat dan Pekon dalam menyelenggarakan pertemuan-pertemuan musyawarah secara swadaya dan menyediakan kader-kader pekon yang bertugas secara sukarela serta adanya kesanggupan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan dalam PNPM Mandiri .

2. Kriteria dan Jenis Kegiatan

Kegiatan yang akan dibiayai melalui dana BLM diutamakan untuk kegiatan yang memenuhi kriteria:

- a. lebih bermanfaat bagi RTM, baik di lokasi pekon tertinggal maupun bukan pekon tertinggal
- b. berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan
- c. dapat dikerjakan oleh masyarakat
- d. didukung oleh sumber daya yang ada

Jenis-jenis kegiatan yang dibiayai melalui BLM PNPM Mandiri adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar yang dapat memberikan manfaat langsung secara ekonomi bagi RTM,
- b. Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, termasuk kegiatan pelatihan pengembangan ketrampilan masyarakat
- c. Kegiatan peningkatan kapasitas/ketrampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal (tidak termasuk penambahan modal)
- d. Penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan

3. Mekanisme usulan kegiatan

Setiap pekon dapat mengajukan 3 (tiga) usulan untuk dapat didanai dengan BLM PNPM Mandiri . Setiap usulan harus merupakan 1 (satu) jenis kegiatan/ satu paket kegiatan yang secara langsung saling berkaitan.

Tiga usulan dimaksud adalah:

- a. Usulan kegiatan sarana prasarana dasar atau kegiatan peningkatan kualitas hidup masyarakat (kesehatan atau pendidikan) atau peningkatan kapasitas/ketrampilan kelompok usaha ekonomi yang ditetapkan oleh musyawarah pekon khusus perempuan
- b. Usulan kegiatan simpan pinjam bagi Kelompok Perempuan (SPP) yang ditetapkan oleh musyawarah pekon khusus perempuan. Alokasi dana kegiatan SPP ini maksimal 25% dari BLM kecamatan. Tidak

ada batasan alokasi maksimal per pekon namun harus mempertimbangkan hasil verifikasi kelayakan kelompok

- c. Usulan kegiatan sarana prasarana dasar, kegiatan peningkatan kualitas hidup masyarakat (kesehatan atau pendidikan) dan peningkatan kapasitas/ketrampilan kelompok usaha ekonomi yang ditetapkan oleh musyawarah pekon.

4. Swadaya Masyarakat

Swadaya adalah kemauan dan kemampuan masyarakat yang disumbangkan sebagai bagian dari rasa ikut memiliki terhadap program. Swadaya masyarakat merupakan salah satu wujud partisipasi dalam pelaksanaan tahapan PNPM Mandiri . Swadaya bisa diwujudkan dengan menyumbangkan tenaga, dana, maupun material pada saat pelaksanaan kegiatan. Dasar keswadayaan adalah kerelaan masyarakat, sehingga harus dipastikan bebas dari tekanan atau keterpaksaan. Upah hari orang kerja (HOK) bagi tenaga kerja RTM, baik laki-laki maupun perempuan, tidak boleh dipotong atau diminta sebagai bentuk kontribusi swadaya masyarakat, karena upah HOK ini ditujukan untuk meningkatkan pendapatan mereka.

5. Kesetaraan dan Keadilan Gender

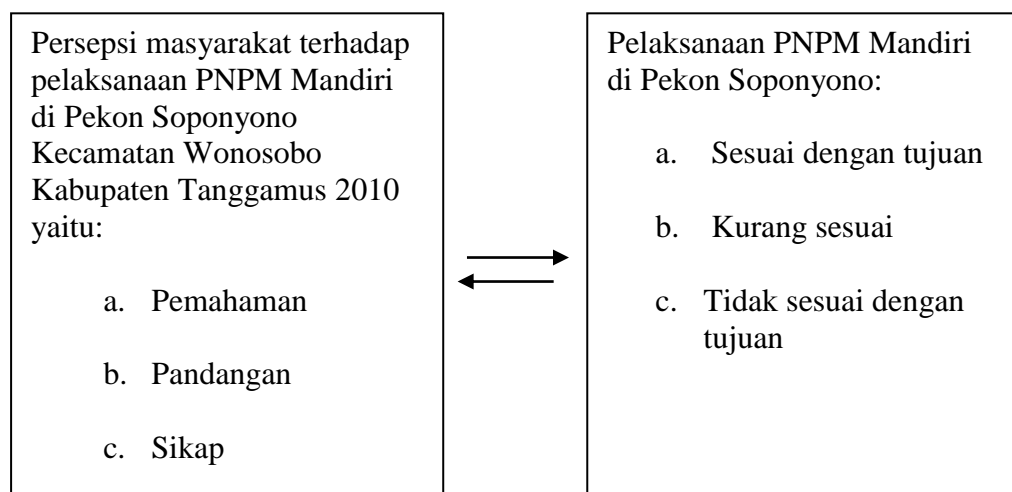
Untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan pemihakan kepada perempuan. Pemihakan memberi makna berupa upaya pemberian kesempatan bagi perempuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, ekonomi, dan politik serta mengakses

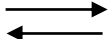
aset produktif. .Sebagai salah satu wujud keberpihakan kepada perempuan, PNPM Mandiri mengharuskan adanya keterlibatan perempuan sebagai pengambil keputusan dan pelaku pada semua tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Kepentingan perempuan harus terwakili secara memadai.

B. Kerangka Pikir

Setelah dilakukan penguraian terhadap beberapa pengertian dan konsep yang akan membatasi penelitian ini, maka kerangka pikir merupakan instrumen yang memberikan penjelasan bagaimana upaya penulis memahami pokok masalah, maka penulis mengambil beberapa persepsi masyarakat tentang pelaksanaan PNPM Mandiri . Yaitu, pemahaman, pandangan, dan sikap masyarakat.

Gambar 1. Kerangka pikir persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri di Pekon Sopyono Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus 2010



Keterangan :  Garis hubungan